

## ABSTRAK

**Nandang Fathurrahman (2200050009):** *“Penggangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Kabupaten Majalengka”*.

Penggangkatan anak masih dipilih oleh masyarakat sebagai pilihan untuk memiliki anak. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat itu perlu menggunakan penetapan pengadilan dan dicatatkan di Disdukcapil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun tetap masih dijumpai Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan di Kabupaten Majalengka.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang terjadi di Kabupaten Majalengka. 2) Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Kabupaten Majalengka. 3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan KHI (Kompilasi Hukum Islam) terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pengaturan Hukum positif mengenai Pengangkatan Anak di Indonesia adalah PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 10 menjelaskan bahwa: pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan baik secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak haruslah menggunakan penetapan pengadilan. Kemudian, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, sesuai dengan pasal 171 huruf (h) KHI. Teori Kepastian Hukum adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu merupakan data Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang relevan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data Primer seperti data-data yang diperoleh dari Disdukcapil dan pihak-pihak terkait pengangkatan anak, sedangkan data sekunder meliputi buku-buku literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kepustakaan.

Hasil penelitian; (1) Proses pengangkatan anak yang dilakukan di Kabupaten Majalengka tidak dilakukan penetapan pengadilan dan dicatatkan di Disdukcapil, prosesnya melalui kesepakatan kedua belah pihak secara lisan. Hal ini menjadi perlu ditekankan agar pengangkatan anak selanjutnya diproses melalui pengadilan dan dicatatkan di Disdukcapil supaya memiliki legalitas dan lebih menjamin hak-hak anak di tangan orang tua angkatnya, sesuai dengan Pasal 10 PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Serta Pasal 171 Huruf (h) KHI. (2) Mengenai pemenuhan hak anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Kabupaten Majalengka dengan melalui: a. Melakukan pengangkatan anak sesuai dengan prosedur, kemudian b. *Itsbat* pengangkatan anak. (3) Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kabupaten Majalengka sebagai berikut: Pengangkatan anak tidak mengakibatkan perubahan nasab, tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkat secara langsung dan anak tetap memakai nama dari bapak kandung, Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

**Kata Kunci:** *Penggangkatan Anak, Penetapan Pengadilan.*

## ABSTRACT

**Nandang Fathurrahman (2200050009):** “*Child Adoption without Court Determination and its Rights according to the Compilation of Islamic Law in Majalengka Regency.*”

Adoption is still chosen by the community as an option for having a child. The adoption process carried out by the community needs to undergo court approval and be registered with the Civil Registration and Vital Statistics Agency (Disdukcapil) in accordance with the applicable laws and regulations. However, cases of Adoption without Court Approval are still found in Majalengka Regency.

The objectives of this research were: 1) To find out how the process of child adoption without court determination occurs in Majalengka Regency. 2) To determine how to fulfill adopted children's rights without court determination in Majalengka Regency. 3) To investigate the perspective of Islamic Legal Compilation (Kompilasi Hukum Islam or KHI) regarding child adoption without court determination in the Majalengka Regency.

This research is based on the idea that the legal framework regarding Child Adoption in Indonesia is governed by Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption. Article 10 explains that the adoption of a child, whether directly or through childcare institutions, must be determined by a court order. Furthermore, an adopted child is a child whose daily care, education expenses, and other needs shift from their biological parents to their adoptive parents, in accordance with Article 171 letter (h) of the KHI. The theory of Legal Certainty states that positive state administrative law must be able to provide legal certainty guarantees to the population.

The method used in the preparation of this thesis was a descriptive analysis method, which involved data on the Adoption of Children without Court Determination. The data was then analyzed based on relevant legal principles. The data sources used were primarily from primary sources, such as data obtained from the Civil Registry Office and related parties involved in child adoption, while secondary data included literary books. Data collection techniques were carried out through interviews and literature review.

(1) The process of child adoption conducted in Majalengka Regency is not carried out through court determination and registration at the Civil Registry Office (Disdukcapil). Instead, the process relies on verbal agreements between both parties. It is essential to emphasize that future child adoptions should be processed through the court and recorded at the Civil Registry Office to ensure legality and better protection of the adopted child's rights in the hands of their adoptive parents, in accordance with Article 10 of Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption, and Article 171 letter (h) of the KHI. (2) Regarding efforts that can be undertaken for adoptive children without court determination to obtain their rights in Majalengka Regency, the steps are as follows: a. Conducting the child adoption according to the proper procedure, and b. Validating the child adoption (*itsbat*). (3) An examination of the Compilation of Islamic Law on child adoption without court determination in Majalengka Regency reveals the following points: Child adoption does not change the lineage (*nasab*) of the child, does not result in legal inheritance rights, the adoptive child is not allowed to use the name of the adoptive parents directly, and the child still retains the name of their biological father. Furthermore, adoptive parents cannot act as guardians in marriage matters concerning their adopted child.

**Keywords:** *Child Adoption, Court Determination.*